

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya segala bentuk aktivitas ataupun kegiatan manusia akan memiliki risiko dengan tujuan untuk kesenangan maupun kebutuhan. Menurut Dewi (2019) risiko merupakan suatu bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan mempertimbangkan keputusan yang diambil pada saat ini. Segala risiko yang akan terjadi dapat dipertimbangkan melalui tolak ukur yaitu manajemen risiko guna mencegah hingga mengendalikan potensi bahaya atau kecelakaan dalam aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan manusia.

Menurut SBC Warburg (2004) dalam Hairul (2020) menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko baik secara fundamental (mendasar) maupun *particular* (khusus). Manajemen risiko memberikan banyak manfaat baik bagi pengelola maupun wisatawan, menurut Bong dkk (2019) dalam Prameswari (2020) menyatakan bahwa manajemen risiko memberikan manfaat antara lain meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan wisatawan, meningkatnya kepuasan wisatawan, meningkatkan jumlah kunjungan, menjadi tolak ukur keberhasilan dan risiko kegagalan operasional sebuah perusahaan, industri, atau pemerintahan.

Mengacu pada The Workers' Compensation Board (WCB) of British Columbia (WCB) (2002) dalam Yudistira dan Susanto (2012), mengenai program kesehatan dan keamanan dalam pengembangan proses perencanaan manajemen risiko maka akan dilakukan perencanaan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi hingga memberlakukan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko memiliki tiga langkah antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang didukung dengan proses komunikasi dan konsultasi serta pemantauan dan tinjauan.

Aktivitas wisata rekreasi menjadi kebutuhan manusia pada masa kini, dimana rekreasi menurut Adisasmita (2010) merupakan kegiatan wisata pada olah raga untuk menghilangkan ketegangan dan dapat melakukan kontak sosial dalam suasana yang santai. Menurut Wood (2002) dalam Kurniawan, dkk (2021) menjelaskan bahwa terjadi perubahan pola aktivitas wisata dari matahari, laut dan pasir pantai (*sun, sea and sand*) mengarah ke wisata berbentuk alam, serta terjadi perubahan pola kegiatan industri pariwisata dari kegiatan wisata massal (*mass tourism*) ke wisata minat khusus (*niche tourism*). Aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan di alam antara lain, yaitu menikmati pemandangan alam, bermain di alam terbuka, mendaki gunung, berkemah, dan lain sebagainya.

Salah satu aktivitas wisata rekreasi yang dapat dan mudah dilakukan di alam adalah berkemah (*camping*). Menurut Brochado & Pereira (2017) dalam Monita (2019) berkemah merupakan bagian dari aktivitas ataupun akomodasi rekreasi yang terjadi luar ruangan (*outdoor*) untuk mengisi waktu luang

maupun kegiatan liburan yang dapat dilakukan baik bersama keluarga, kelompok, maupun perorangan.

Berbagai aspek manajemen risiko sangat diperlukan untuk melakukan aktivitas wisata rekreasi khususnya yang dilakukan di ruang terbuka atau alam, karena tidak sedikit kawasan wisata yang belum mengelola manajemen risiko secara maksimal. Pengelolaan manajemen risiko yang kurang menyebabkan berbagai dampak antara lain menimbulkan kecelakaan, bencana alam, penyakit, dan lain-lain. Rifai, dkk (2020) menyatakan bahwa kawasan aktivitas wisata alam memiliki kerentanan terhadap risiko bahaya, maka dari itu perlu adanya upaya pengendalian risiko seperti pembuatan *standar operasional prosedur* (SOP) bagi pekerja dan wisatawan, penyediaan alat pelindung diri (APD), dan melakukan pelatihan dasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, perancangan kawasan wisata juga sangat diperlukan untuk mengembangkan aktivitas wisata *camping*.

Dewi (2015) dalam penelitiannya membagi tindakan manajemen risiko ke dalam tiga rencana berdasarkan jangka waktu rencana yaitu rencana tindakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rencana tindakan jangka pendek yaitu koordinasi intensif antar *stakeholder*, *monitoring*, aturan aktivitas wisata, relokasi lokasi longsor dan perubahan vegetasi. Rencana tindakan jangka menengah yaitu kajian multidisipliner, pemberlakuan AMDAL, PERDA pengendalian pemanfaatan, *masterplan* kawasan, dan inovasi pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*). Rencana tindakan jangka panjang yaitu pembentukan badan

pengelola, asuransi wisatawan, *monitoring* sistematis dan evaluasi pengelolaan kawasan wisata. Dalam mengembangkan kawasan wisata, analisis manajemen risiko dapat diterapkan dengan tujuan untuk menemukan risiko bahaya.

Rinaldi (2015) dalam penelitiannya berpendapat bahwa kawasan bumi perkemahan harus dirancang berdasarkan keadaan topografi dan vegetasi yang menyesuaikan usia, tingkatan dan perkembangan mental sehingga mampu mewadahi kegiatan berkemah. Perancangan kawasan wisata berkaitan dengan elemen kawasan seperti penggunaan dan pola tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan topografi *eksisting* (sebagai ruang kegiatan), dan struktur kawasan.

Menurut Rambe (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kawasan perkemahan perlu memiliki teritori tata guna lahan yang sesuai dengan elemen kawasan wisata. Kerentanan atau kelayakan aktivitas wisata dapat dilihat dari daya dukung fisik dan lingkungannya, karena setiap kawasan wisata memiliki kemampuan berbeda dalam menampung aktivitas wisata dan wisatawan. Selaras dengan penelitian Ramadhani, dkk (2020), kawasan berkemah dapat dibagi menjadi beberapa zona, antara lain zona penerimaan dan pengelola, zona aktivitas wisata, zona fasilitas (akomodasi, toilet, mushola, dan parkir). Pembagian zona ini dilakukan agar kawasan wisata dapat mewadahi segala aktivitas wisata di area perkemahan dan memiliki pola kawasan.

Angguni (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa di kawasan perbukitan dapat melakukan berbagai aktivitas wisata, antara lain *outbond*,

camping, trial, photography, hiking, pesta budaya dan kunjungan kawasan alam. Dalam berkemah di kawasan perbukitan, wisatawan dapat melakukan api unggun, pesta *barbeque, trekking* atau *jogging* dan melakukan permainan-permainan.

Bumi perkemahan Bukit Pelangi berada pada salah satu kawasan di Kecamatan Sangatta Utara dengan luas lahan kurang lebih 27,3 ha yang menjadi pusat perkantoran pemerintah daerah dan aktivitas wisata. Salah satu kawasan aktivitas di Bukit Pelangi adalah sub-area Bukit Pandang, dengan ketinggian 78 meter di atas permukaan laut. Dari ketinggian Bukit Pandang, wisatawan dapat menyaksikan kawasan pertambangan di sisi utara dan lautan yang bemuatan kapal batubara di sisi timur. Selain itu di sisi selatan akan terlihat hamparan perbukitan dan di sisi barat merupakan kawasan pemukiman Kota Sangatta.

Pemanfaatan lahan kosong di sub-area Bukit Pandang, Bukit Pelangi dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas wisata berupa berkemah dan melihat lanskap Kota Sangatta oleh masyarakat guna menghilangkan ketegangan dan kejenuhan. Banyaknya peminat aktivitas berkemah di sub-area Bukit Pandang, Bukit Pelangi menarik perhatian peneliti untuk meneliti mengenai manajemen risiko pada aktivitas berkemah melihat kondisi tempat yang berbukit serta kurangnya pendukung keamanan.

Berada pada kontur pebukitan dengan ketinggian 78 mdpl, aktivitas berkemah di area Bukit Pelangi berpotensi memiliki risiko bahaya. Menurut PERMENPAR RI No 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis

Kepariwisata, potensi risiko dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor alam yang diakibatkan oleh bencana alam diluar kehendak manusia dan faktor non-alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang merusak hingga menyebabkan kerugian secara fisik atau material.

Meskipun aktivitas berkemah di sub-area Bukit Pandang, Bukit Pelangi tergolong baru dan belum ada kecelakaan yang terjadi, namun diharapkan melalui penelitian ini dapat diketahui penanganan dan pencegahan kecelakaan yang tepat serta mencegah dan menangani potensi bahaya atau kecelakaan pada aktivitas berkemah yang dapat diimplementasikan oleh pihak pengelola, masyarakat lokal dan pemerintah berdasarkan pada tujuh faktor *risk event* dengan model optimasi pedoman ISO 31000:2009.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada manajemen risiko dari adanya aktivitas wisata berkemah yang dilakukan di Bukit Pelangi, Sangatta untuk melihat potensi risiko dan membuat kesesuaian rencana manajemen risiko agar mencegah kecelakaan pada aktivitas berkemah. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kondisi lingkungan perbukitan pada aktivitas berkemah di Bumi Perkemahan, Bukit Pelangi berisiko menimbulkan potensi bahaya?
2. Bagaimana kesesuaian standar manajemen risiko pada aktivitas wisata di Bumi Perkemahan, Bukit Pelangi?

3. Bagaimana tindakan manajemen risiko pengelola dalam menangani potensi bahaya atau kecelakaan pada aktivitas berkemah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi risiko pada aktivitas berkemah serta menentukan penanganan dan pencegahan kecelakaan yang tepat pada aktivitas berkemah dalam mengurangi potensi bahaya yang membahayakan wisatawan pada atraksi utama di Bukit Pelangi, Kab. Kutai Timur.

D. Keterbatasan Penelitian

Mengacu pada *The Workers' Compensation Board (WCB) of British Columbia* (2002), maka penelitian ini akan dibatasi melihat dari perencanaan manajemen risiko dengan melakukan proses manajemen risiko, pemberlakuan risiko dan rencana tindakan manajemen risiko. Selain itu beberapa keterbatasan penelitian dilihat dari waktu pengambilan data yang singkat, kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan menjaga jarak serta terbatasnya tatap muka secara langsung sehingga sumber informasi yang didapatkan kurang maksimal.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai bahan literasi dalam menggali manajemen risiko pada aktivitas wisata khususnya aktivitas wisata berkemah di area perbukitan. Sehingga diharapkan dapat menjadi acuan

pengelolaan aktivitas wisata berkemah yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

2. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai acuan bagi *stakeholder* baik pengelola, pemerintah, dan masyarakat lokal dalam menerapkan dan mengembangkan model manajemen risiko agar dapat menangani bahkan mencegah potensi bahaya pada aktivitas wisata berkemah.